

PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA: TANTANGAN UNDANG-UNDANG DESA¹

THE DETERMINANT FACTOR OF PUBLIC PARTICIPATION IN VILLAGE DEVELOPMENT: CHALLENGE FOR THE VILLAGE LAW

Heru Syah Putra²

Email : heruaddaif@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of individual characteristics on public participation in Indonesia. This study uses data from IFLS 5 that was conducted in 2014 and 2015 with total sample is 31.410. This study uses a linear probability model (LPM) to estimate the probability of a person participate in village's activities such as community meetings and development activities. The results shows that educated person is more likely to attend village's meetings by 8,5 percent than less-educated person. However, regarding development activities, education has a negative effect on participation. Further, gender is an crucial issue regarding participation because a woman tends to be less involved in village activities. Overall, the awareness of people on village development is relatively low because less than 50 percent respondents realize or participate in village activities. Therefore, there is a need to improve the mechanism and strategies for public participation as ordered by the Village Law.

1188

Keywords: Decentralization, Participation, The Village Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji karakteristik individu masyarakat terhadap keterlibatan di dalam kegiatan-kegiatan desa di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan hasil survei IFLS 5 yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2014 dan 2015. Sebanyak 31.410 individu dewasa menjadi sampel. Penelitian ini menggunakan *linear probability model (LPM)* untuk menguji kecenderungan seseorang terlibat dalam kegiatan-kegiatan desa seperti rapat desa dan kegiatan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang berpendidikan tinggi lebih cenderung menghadiri rapat-rapat desa yaitu sebesar 8,5 persen dibandingkan masyarakat yang pendidikan rendah. Akan tetapi, dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa, pendidikan memiliki hubungan yang negatif. Gender juga menjadi isu di dalam pelibatan, wanita cenderung lebih sedikit terlibat dalam kegiatan desa. Secara keseluruhan, kepedulian masyarakat terhadap kegiatan desa masih relatif rendah karena tidak sampai 50 persen masyarakat yang mengetahui atau terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Oleh sebab itu, perbaikan mekanisme pelibatan masyarakat menjadi sangat penting mengingat amanah UU Desa yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa.

Kata Kunci: Desentralisasi, Partisipasi, Undang-Undang Desa

¹ Naskah diterima 24 November 2016. Direvisi 29 November 2016.

² Pegawai pada PKP2A IV Lembaga Administrasi Negara.

Former student of Policy Program at National Graduate Institute for Policy Studies, Japan

A. PENDAHULUAN

Pelibatan masyarakat merupakan amanah desentralisasi yang harus dilaksanakan. Pelibatan masyarakat dapat meningkatkan efektifitas capaian dan efisiensi pengeluaran kegiatan. Dalam era desentralisasi, penjangkauan informasi yang tepat menjadi sangat penting dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa publik. Dengan mengetahui jenis barang yang dibutuhkan maka pemerintah akan mampu menyediakan barang publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, efisiensi dalam pengeluaran juga dapat dicapai karena pemerintah mengetahui seberapa besar permintaan masyarakat secara tepat. *Over supply* dapat dihindari dalam setiap pengadaan, khususnya pengadaan yang membutuhkan pembiayaan yang besar seperti kegiatan penyediaan listrik (Nurlaila, Yuliar, Kombaitan, & Madyo, 2015).

Pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa bertujuan memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan desa. UU Desa juga bertujuan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. UU Desa menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa, dimulai dari tahap perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Masyarakat diharapkan mampu berkontribusi aktif dalam mengawal pembangunan desa mengingat kewenangan desa telah diperluas.

UU Desa tidak hanya memberikan desa kewenangan yang lebih besar dari sisi administrasi tetapi juga dari segi fiskal. Dengan UU tersebut, hampir seluruh desa di Indonesia mendapat dana tahunan sebesar 1 milyar Rupiah. Amanah baru ini menjadikan desa sebagai titik awal yang strategis untuk

pembangunan Indonesia. Sebelum kebijakan UU Desa dikeluarkan, desa hanya mampu melakukan pembangunan yang begitu kecil karena keterbatasan biaya. Walaupun telah terdapat kegiatan pendanaan lainnya seperti PNPM, pembangunan desa masih dirasakan kecil karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Pemberian kewenangan dan kemampuan fiskal yang luas ini bukan tanpa kekhawatiran. Pengelolaan dana desa dikhawatirkan akan menghadapi masalah perencanaan dan akuntabilitas (Antlöv, Wetterberg, & Dharmawan, 2016).

Permasalahan lain yang dikhawatirkan muncul adalah ketimpangan pembangunan antar desa dan antar kabupaten/kota di Indonesia (Yusuf & Sumner, 2015). Kapasitas dan kemampuasn fiskal akan memperbesar kesenjangan pembangunan. Selain itu, permasalahan kapasitas aparatur desa juga tidak dapat diabaikan mengingat perbedaan kapasitas desa juga mendorong ketimpangan pembangunan (Sinurat & Sumanti, 2016). Desentralisasi fiskal dan peningkatan jumlah pemerintah lokal di Indonesia telah meningkatkan konflik dengan pemerintah pusat yaitu peningkatan permintaan pembentukan kabupaten/kota baru (Murshed, Tadjoeeddin, & Chowdhury, 2009). Lebih lanjut, konflik pengelolaan desentralisasi di Indonesia bisa terjadi pada setiap proses kebijakan yaitu pada proses perencanaan, penerapan, atau pasca penerapan (Peluso, 2007).

Oleh sebab itu, salah satu cara untuk menjamin kelancaran pelaksanaan UU Desa adalah dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor perencana, pengawas, dan pelapor setiap kegiatan-kegiatan di desa. Akan tetapi, pelibatan masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan mengingat keberagaman keinginan (*preferences*) setiap individu. Selain itu, pelibatan masyarakat juga terkendala adanya perbedaan karakteristik antar individu di desa seperti

pendidikan, gender, dan usia. Salah satu kondisi yang masih diperdebatkan dalam penelitian partisipasi adalah tingkat pendidikan. Pendidikan mampu meningkatkan dan menurunkan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan suatu wilayah. (Dhokhikah, Trihadiningrum, & Sunaryo, 2015). Permasalahan lain yaitu gender, dimana pelibatan masyarakat masih dipengaruhi oleh isu-isu gender yang dapat juga terkait dengan sosial dan budaya (Okoro, 2016; Prasisca & Sutikno, 2015).

Masih terbatasnya penelitian yang mengangkat isu pelibatan masyarakat mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang memetakan tingkat partisipasi masyarakat desa pada kegiatan-kegiatan desa. Penelitian ini juga ditujukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang di dalam kegiatan-kegiatan di Desa. Beberapa karakteristik individu akan diuji secara statistik guna mengetahui seberapa besar pengaruh karakteristik individu terhadap partisipasi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dalam upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan desa pada era UU Desa. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi salah satu rujukan awal tentang pengembangan penelitian lanjutan terkait dinamika pelaksanaan UU Desa.

B. LITERATUR REVIEW

Bab ini diawali dengan pembahasan konsep desentralisasi yang merupakan amanah terbesar dalam teori desentralisasi. Selanjutnya, teori pembangunan desa dikaji secara ringkas guna menggambarkan definisi pembangunan desa dan tantangannya. UU Desa juga akan dibahas secara ringkas guna memahami amanah yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya beberapa tantangan penerapan UU Desa juga dibahas secara singkat dengan melihat penelitian-

penelitian sebelumnya. Terakhir, hubungan desentralisasi dan pelibatan/partisipasi masyarakat menjadi penutup bagian ini.

1. Desentralisasi

Desentralisasi didefinisikan secara luas sebagai pengalihan tanggung jawab untuk perencanaan, pengelolaan, dan peningkatan sumber daya dari pemerintah pusat kepada lembaga-lembaga pemerintah yang lebih kecil, termasuk di dalamnya pemerintah daerah (Khan, 2013). Desentralisasi tidak terbatas hanya pengalihan fungsi ke pemerintah desa tetapi juga pengalihan fungsi dan kewenangan kepada pihak swasta yang berkerja seperti lembaga pemerintahan.

Desentralisasi terbagi ke dalam beberapa bentuk, sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Rondinelli (dalam Khan, 2013) mengelompokkan desentralisasi ke dalam empat jenis yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Sedangkan Manor (1999) membagi desentralisasi ke dalam tiga jenis berdasarkan jenis kewenangan yang diserahkan yaitu dekonsentrasi atau desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, dan devolusi atau desentralisasi demokratis. Dalam penerapannya, semua jenis desentralisasi tersebut dapat berjalan secara bersamaan atau terpisah sesuai dengan kebutuhan.

Dekonsentrasi atau desentralisasi administratif melibatkan pengalihan tanggung jawab administratif khusus untuk tingkat yang lebih rendah dalam kementerian pemerintah pusat dan lembaga (Khan, 2013). Menurut Mawhood (Khan, 2013) penerapan dekonsentrasi atau desentralisasi akan mudah menghadapi permasalahan di negara-negara berkembang mengingat pengalihan kewenangan administrasi harus diikuti dengan kemampuan pengelolaan administrasi negara.

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai

pemberian atau pengalihan kewenangan mengelola sumber daya di daerah kepada pemerintah daerah yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat (Khan, 2016). Desentralisasi fiskal juga dilanjutkan dengan kegiatan stabilisasi kemampuan fiskal antar daerah dengan mentransfer dana perimbangan ke pemerintah lokal yang memiliki kemampuan fiskal lebih rendah (Malik, Mahmood-Ul-Hassan, & Hussain, 2006).

Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Perencanaan terpusat atau sentralisasi sering menghadapi kekeliruan dalam merencanakan program dan kegiatan karena rantai perencanaan yang jauh dari masyarakat. Selain itu, desentralisasi fiskal juga meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya dan pengadaan barang publik karena penetapan jenis pengeluaran dilakukan oleh pemerintah daerah/lokal yang mengetahui kebutuhan daerah. Oates (1993, dalam Malik, Mahmood-Ul-Hassan, & Hussain, 2006) menyimpulkan bahwa penyediaan barang dan jasa publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan hanya akan efisien jika dilakukan dengan pendekatan desentralisasi.

2. Pembangunan Desa

Pembangunan desa masih menjadi perdebatan yang luas di antara pakar khususnya terkait pendefinisian dan tujuan. Perdebatan yang pertama dipicu oleh penggunaan istilah pembangunan desa yang sering disama artikan dengan pembangunan lokal atau daerah tertinggal (Straka & Tuzová, 2016). Kedua, pembangunan desa tidak dengan mudah digeneralisasi mengingat kondisi desa antar negara sangatlah berbeda, bahkan di dalam suatu negara sendiri terdapat perbedaan karakteristik desa yang biasanya disebabkan perbedaan budaya.

Chromy dkk (2011) mengidentifikasi dua pendekatan untuk menentukan daerah pedesaan yaitu pendekatan yang luas dan pendekatan yang sempit. Dalam pendekatan yang luas, setiap daerah yang tidak masuk dalam wilayah perkotaan di kelompokkan sebagai desa. Selain itu, desa juga dapat ditetapkan dengan pendekatan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk (pendekatan yang sempit). Di Inggris, pedesaan ditetapkan bagi daerah yang berpenduduk kurang dari 10.000 jiwa (Bibby, 2013).

Pembangunan desa memiliki beberapa definisi, tergantung dari negara atau lembaga yang menyusunnya. Chambers (2013: 147) menyatakan bahwa pembangunan pedesaan adalah upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kelompok-kelompok miskin yang tinggal di desa, baik wanita maupun pria, untuk dapat memberi dan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan yang mereka butuhkan. Pembangunan pedesaan juga dapat diartikan sebagai perbaikan kondisi desa atau komunitas yang meliputi seluruh aspek, baik aspek lingkungan, kesehatan, perumahan maupun kondisi ekonomi masyarakat (USDA, 2006:1).

Pemerintah Indonesia menetapkan definisi pembangunan desa sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dimulai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mewajibkan keterlibatan masyarakat.

Di Indonesia, pembangunan desa memiliki pemaknaan khusus. Berdasarkan UU Desa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan Desa di Indonesia harus dilakukan berdasarkan rencana kerja Pemerintah Desa. Pembangunan Desa sebagaimana dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

3. Undang-Undang Desa: Ringkasan dan Tantangan

Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Seluruh penyelenggaraan desa akan dilakukan oleh Pemerintah Desa yang didefinisikan sebagai Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selain

itu, desa juga wajib memiliki Badan Permasyarakatan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Tujuan pemberian kewenangan desa adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa. Selain itu, pemberian kewenangan ini juga bertujuan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Desa juga diamanatkan untuk mampu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Nilai-nilai kerja seperti profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab wajib dikedepankan dalam mengelola dana desa.

Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pemerintahan desa dapat secara jelas terlihat dari kewajiban adanya musyawarah desa. Musyawarah desa didefinisikan sebagai forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di dalam UU Desa, pemberdayaan masyarakat desa didefinisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

UU Desa mewajibkan adanya musyawarah perencanaan pembangunan

desa. Tujuan musyawarah tersebut adalah menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan UU Desa penentuan prioritas dan program serta kegiatan di desa harus mempertimbangkan beberapa kondisi yaitu:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Penerapan UU Desa tidak terlepas dari permasalahan karena Indonesia masih belajar menerapkan desentralisasi yang seluas-luasnya. Permasalahan yang dipetakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya berfokus pada proses perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Antlöv dkk (2016) melakukan kajian yang bertujuan untuk mengukur efek penerapan UU Desa terhadap kemampuan masyarakat desa menjalankan pemerintahan pasca pemberlakuan UU Desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan UU Desa akan terkendala permasalahan pengelolaan keuangan, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan mekanisme perencanaan dan akuntabilitas menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Vel dan Bedner (2015) dalam

penelitiannya yang berjudul *Desentralisasi dan Pemerintah Lokal di Indonesia* menyimpulkan bahwa pemberlakuan UU Desa akan memberikan kesempatan pemerintah lokal untuk kembali mengembangkan pemerintah seperti di Sumatera Barat yang dikenal dengan sistem *nagari*. UU Desa secara langsung memberikan kesempatan pemerintahan desa untuk mengembangkan hukum adat pasca pemberlakuan UU Desa. Kembalinya hukum adat diharapkan mampu mempercepat pembangunan desa dan mengurangi konflik yang timbul di desa.

Tantangan penerapan UU Desa juga tidak terlepas dari kondisi makro ekonomi yang akan berdampak langsung terhadap penduduk miskin. Yusuf dan Sumner (2015) melakukan kajian yang mengukur kondisi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan pasca pelantikan presiden Jokowi yang juga bertepatan dengan tahun pemberlakuan UU Desa. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kemiskinan akan semakin memburuk pada tahun 2015 walaupun pada tahun 2014 Indonesia mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan. Salah satu penyebabnya adalah kondisi ekonomi global dan nasional yang masih belum stabil.

4. Hubungan Desentralisasi dengan Partisipasi Masyarakat

Desentralisasi merupakan cara yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Khan, 2013). Partisipasi berarti pembagian kekuasaan dalam pengambilan keputusan dari pemerintah ke masyarakat. Blair (2000) menganggap partisipasi sebagai komponen kunci yang diperlukan untuk membuat pemerintahan daerah menjadi demokratis. Menurut Blair (1998), desentralisasi meningkatkan partisipasi demokratis dengan mendorong orang untuk terlibat dalam proses politik. Peningkatan

kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik dapat dilakukan dengan meningkatkan kontribusi kelompok masyarakat seperti kaum minoritas, pemilik bisnis kecil, pengrajin, petani marjinal, dan kaum miskin kota dengan penetapan mekanisme yang mudah.

Pakar ilmu administrasi negara telah menetapkan berbagai mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam penyediaan barang dan jasa publik. Secara umum, mekanisme tersebut dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu *voice approach* dan *exit approach* (Khan, 2013; Khan, 2016). *Voice approach* memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan secara langsung keinginan mereka terhadap jenis-jenis dan kualitas pelayanan. Penyampaian

usulan tersebut dapat dilakukan melalui rapat-rapat perencanaan dan evaluasi kegiatan. Pendekatan ini dapat juga dilakukan dengan pengadaan survei keinginan/kebutuhan masyarakat terhadap jenis dan pengelolaan barang dan jasa publik. *Exit approach* memberikan pendekatan yang berbeda yaitu masyarakat berpartisipasi dengan meninggalkan atau tidak menggunakan barang dan jasa publik yang telah disediakan oleh pemerintah (Khan, 2013). Pada pendekatan ini, kekecewaan juga dapat dilakukan dengan tidak terlibat pada kegiatan-kegiatan masyarakat pada wilayah administrasi tempat tinggal dan memilih wilayah administrasi lain.

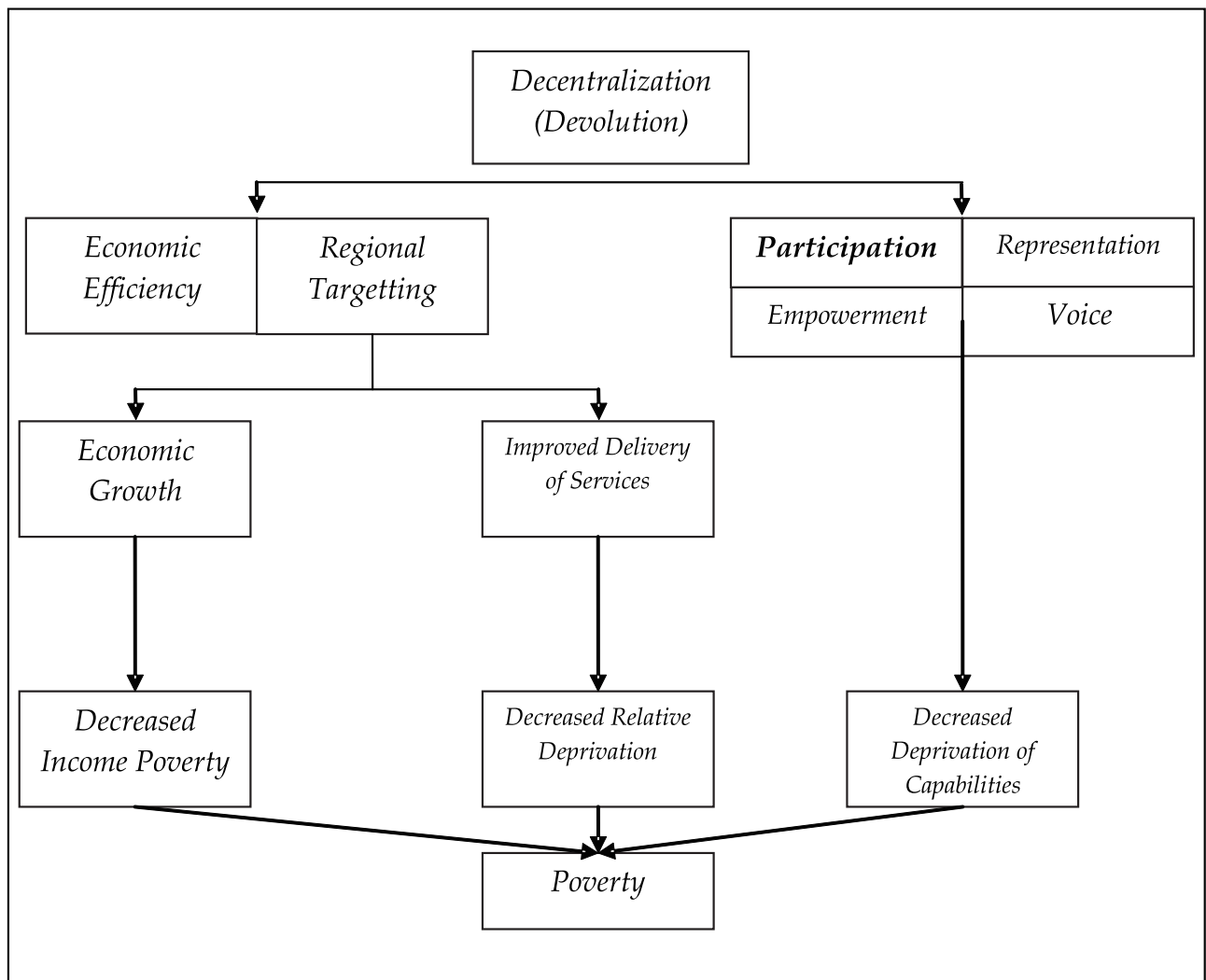


Diagram 1. Pelibatan Masyarakat dalam Model Desentralisasi, Khan (2016)

Dalam era desentralisasi, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dipengaruhi oleh faktor individu dan lingkungan. Salah satu faktor individu yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya adalah perbedaan gender. Wanita terlihat lebih sedikit terlibat dalam kegiatan pendidikan dibandingkan pria (Rock dkk, 2016). Komposisi wanita yang lebih sedikit juga terlihat pada kegiatan-kegiatan kesehatan. Permasalahan gender bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan mengingat gender menjadi sebuah isu yang terkait dengan budaya dan agama (Okoro, 2016; Prasisca & Sutikno, 2015). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa wanita masih memiliki peran yang kecil dalam kegiatan pembangunan khususnya pembangunan-pembangunan di pemerintahan daerah. Selanjutnya, partisipasi juga dipengaruhi oleh pendidikan masyarakat (Bardosh, 2015).

Partisipasi publik juga sangat terkait dengan kondisi eksternal seperti mekanisme pelibatan dan kondisi politik. Mekanisme pelibatan yang tepat akan meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap agenda-agenda pembangunan (Rega & Baldizzone, 2015). Sedangkan mekanisme yang terlalu sulit atau *time-consuming* akan sulit mendapat perhatian publik. Oleh sebab itu, penyusunan mekanisme pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan haruslah mempertimbangkan karakteristik individu masyarakat desa dan karakteristik desa.

C. METODE PENELITIAN

1. Model Pengujian

Penelitian ini menggunakan regresi linier untuk menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan di Desa. Pendekatan regresi linear telah luas digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya untuk mengukur sikap masyarakat terhadap kualitas pelayanan

yang diberikan pemerintah. Pendekatan tersebut juga dapat digunakan untuk mengukur kecenderungan untuk menghadiri dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan desa. Dengan mengasumsikan partisipasi masyarakat adalah fungsi dari kondisi individu maka model penelitian sebagai berikut:

$$Pr_{ij} = \beta_0 + \beta_1 Ed_{ij} + \beta_2 Mrd_{ij} + \beta_3 Fe_{ij} + \beta_4 Age_{ij} + \beta_5 Rd_{ij} + \beta_6 Wr_{ij} + e_{ij}$$

Pr_{ij} adalah variabel independen yang menggambarkan partisipasi masyarakat. Variabel ini diukur dengan melihat kehadiran responden dalam beberapa kegiatan yaitu rapat desa, kerja bakti, kegiatan pembangunan desa, kegiatan PNPM dan kegiatan keagamaan. Masing-masing variabel dependen akan diuji secara terpisah guna mendapat hasil yang berbeda untuk setiap jenis kegiatan. Pendekatan data yang digunakan adalah pendekatan data biner.

Ed_{ij} merupakan variabel pendidikan yang menggambarkan lulusan terakhir responden. Variabel ini bernilai 1 untuk responden yang lulusan universitas dan bernilai 0 untuk masyarakat yang bukan lulusan universitas. Mrd_{ij} dan Fe_{ij} adalah variabel untuk status menikah dan jenis kelamin perempuan. Variabel ini juga menggunakan pendekatan biner yaitu 1 dan 0. Kemampuan membaca dan menulis juga dikontrol dalam model penelitian ini yang tergambarkan oleh variabel Rd_{ij} dan Wr_{ij} . Sedangkan usia dikontrol dengan pendekatan data kontinyu dengan simbol Age .

Tujuan utama penelitian ini akan terjawab dengan memperhatikan besaran masing-masing koefisien variabel independen. Tingkat signifikansi pengaruh dapat dilihat dengan membandingkan nilai t-tabel dan t-hitung. Tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat dengan menghitung frekuensi partisipasi

masyarakat pada kegiatan-kegiatan desa.

2. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data Indonesia Family Life Survei (IFLS) ke 5 yang dikumpulkan oleh RAND. IFLS merupakan survei kondisi ekonomi dan pemerintah desa di Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 1992 sebagai gelombang pertama. Hingga tahun 2014/2015, yaitu gelombang ke 5, survei ini telah melakukan peningkatan jumlah responden yaitu sampel rumah tangga sebanyak 16.204 dan sampel individu sebanyak 50.148 individu. Penelitian ini juga mengukur kondisi desa atau komunitas sebanyak 311 desa.

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 31.410 individu dewasa yang menjawab seluruh pertanyaan dengan lengkap. Adapun deskripsi statistik setiap variabel yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

kegiatan-kegiatan pembangunan sehingga lebih merasa memiliki terhadap keputusan tersebut (Nurudin dkk., 2015). Peningkatan masyarakat juga akan meningkatkan capaian dan efisiensi kegiatan. *Over supply* dan *high cost provision* dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat dari tahapan perencanaan, monitoring, hingga evaluasi.

Penelitian ini mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat di Indonesia yang terbagi ke dalam lima kegiatan yaitu rapat desa, kerja bakti, kegiatan pembangunan desa, kegiatan PNPM, dan kegiatan keagamaan.

Sebesar 15.753 individu atau 50,15 persen responden mengetahui bahwa terdapat kegiatan rapat desa selama tahun 2014. Hasil pengumpulan data ini mengejutkan mengingat sekitar 40 persen responden tidak mengetahui tentang adanya rapat desa di desa masing-masing. Hal ini bisa terjadi karena mekanisme rapat yang

Tabel 1. Deskripsi Statistik

<i>Variable</i>	<i>Obs</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Dev.</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>
Usia	31.402	37,33	14,93	14	101
Status perkawinan	31.408	0,72	0,45	0	1
Perempuan	31.408	0,53	0,49	0	1
Kemampuan membaca	31.408	0,92	0,27	0	1
Kemampuan menulis	31.408	0,91	0,28	0	1
Pendidikan tinggi	31.408	0,12	0,34	0	1
Partisipasi pertemuan desa	31.408	0,20	0,40	0	1
Partisipasi kerja bakti	31.408	0,26	0,43	0	1
Partisipasi kegiatan pembangunan desa	31.408	0,21	0,41	0	1
Partisipasi kegiatan keagamaan	31.408	0,53	0,49	0	1
Partisipasi kegiatan PNPM	31.408	0,06	0,23	0	1

Sumber: Hasil pengolahan penulis dari survei IFLS5

D. HASIL PENELITIAN

1. Keterlibatan Masyarakat pada Kegiatan Desa

Salah satu tujuan pelibatan masyarakat adalah mendekatkan masyarakat dalam

kurang menarik atau sosialisasi yang kurang dari aparatur desa. Berdasarkan hasil pertanyaan lanjutan diketahui bahwa hanya sekitar 40 persen responden yang menghadiri kegiatan rapat desa (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Keterlibatan dalam Kegiatan Rapat Desa

Jawaban	Mengetahui		Berpartisipasi	
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Ya	15.753	50,15	6.392	40,58
Tidak	12.566	40,01	9.361	59,42
Tidak Mengetahui	3.091	9,84		
Total	31.410	100,00	15.753	100,00

Sumber: Hasil pengolahan penulis dari survei IFLS5

Tabel 3. Keterlibatan dalam Kerja Bakti di Desa

Jawaban	Mengetahui		Berpartisipasi	
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Ya	14.676	46,72	8.046	54,82
Tidak	15.612	49,70	6.630	45,18
Tidak Mengetahui	1.122	3,57		
Total	31.410	100,00	14.676	100,00

Sumber: Hasil pengolahan penulis dari survei IFLS5

Kegiatan kerja bakti juga hanya diketahui oleh sekitar 45 persen responden di desa masing-masing. Tingkat partisipasi kegiatan kerja bakti dan gotong royong hanya sebesar 54 persen. Hal ini sedikit berbeda dengan kegiatan-kegiatan pembangunan desa yaitu dihadiri hanya sekitar 48 persen responden penelitian. Terdapat sekitar 47 persen responden yang bahkan tidak mengetahui terdapat kegiatan-kegiatan pembangunan desa (lihat Tabel 4).

Sebelum adanya Dana Desa, pembangunan mandiri dapat bersumber juga dari kegiatan PNPM. Pemanfaatan dana PNPM harus secara kelompok dengan persyaratan harus dialokasikan untuk kegiatan pembangunan ekonomi kelompok atau pembangunan infrastruktur. Hasil survei IFLS terhadap 31.410 masyarakat menunjukkan bahwa hanya sebesar 35 persen responden yang mengetahui adanya kegiatan PNPM, sedangkan 51 persen tidak

Tabel 4. Keterlibatan dalam Kegiatan Pembangunan Desa

Jawaban	Mengetahui		Berpartisipasi	
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Ya	15.188	48,35	6.708	44,17
Tidak	14.941	47,57	8.480	55,83
Tidak Mengetahui	1.281	4,08		
Total	31.410	100,00	14.676	100,00

Sumber: Hasil pengolahan penulis dari survei IFLS5

Tabel 5. Keterlibatan dalam Kegiatan PNPM di Desa

Jawaban	Mengetahui		Berpartisipasi	
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Ya	11.168	35,56	1.835	16,43
Tidak	16.075	51,18	9.332	83,56
Tidak Mengetahui	4.166	13,26	1	0,01
Total	31.410	100,00	11.168	100,00

Sumber: Hasil pengolahan penulis dari survei IFLS5

mengetahui (lihat Tabel 5). Hanya 16 persen yang terlibat kegiatan PNPM dari total sekitar 11.168 yang mengetahui. Rendahnya pelibatan masyarakat ini bukan dikarenakan ketidakinginan masyarakat tetapi karena hanya peserta dalam kelompok pendanaan PNPM yang hadir dalam setiap kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, rendahnya angka partisipasi kegiatan ini tidak mencerminkan ukuran kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.

Kepedulian masyarakat dalam kegiatan keagamaan di desa juga dapat menjadi indikator tingkat kepedulian terhadap pembangunan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 85 persen responden mengetahui adanya kegiatan-kegiatan keagamaan di desanya. Sebanyak 61 persen responden menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan di desa, sedangkan 38 persen memilih tidak mengikuti kegiatan keagamaan walaupun mengetahui kegiatan tersebut (lihat Tabel 6).

2. Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keinginan untuk Terlibat Pada Kegiatan Desa

Hasil estimasi pertama menunjukkan bahwa pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat pada rapat desa. Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan penjabaran bahwa masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menghadiri kegiatan rapat desa sebesar 8.5 persen dibandingkan masyarakat dengan pendidikan yang lebih rendah. Akan tetapi, pendidikan memiliki hubungan yang negatif terhadap partisipasi pada kegiatan-kegiatan desa yang bertujuan untuk pembangunan desa. Masyarakat yang berpendidikan tinggi cenderung tidak menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut. Secara statistik, masyarakat yang berpendidikan tinggi cenderung untuk tidak menghadiri kegiatan tersebut sebesar 2.25 persen dibandingkan masyarakat yang lebih

Tabel 6. Keterlibatan dalam Kegiatan Religius di Desa

Jawaban	Mengetahui		Berpartisipasi	
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Ya	26.858	85,51	16.612	61,85
Tidak	4.063	12,94	10.246	38,15
Tidak Mengetahui	489	1,56		
Total	31.410	100,00	14.676	100,00

Sumber: Hasil pengolahan penulis dari survei IFLS5

Pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi kehadiran masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa dapat dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Dengan pendekatan *Linear Probability Model (LPM)* kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu dapat dihitung. Tabel 7 menunjukkan besaran pengaruh variabel individu terhadap keinginan menghadiri/berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan di Desa.

rendah pendidikannya. Selanjutnya, tingkat pendidikan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap kehadiran pada kerja bakti atau gotong royong atau kegiatan-kegiatan lain yang bersifat sukarela/tanpa bayaran.

Pernikahan menjadikan seseorang lebih tertarik untuk menghadiri kegiatan desa. Hasil estimasi menunjukkan bahwa seseorang yang telah menikah cenderung untuk menghadiri kegiatan di desa dibandingkan individu yang belum menikah. Penduduk yang telah menikah

cenderung menghadiri rapat desa 8,5 persen lebih tinggi dibandingkan yang belum menikah, begitu juga untuk kegiatan kerja bakti yaitu lebih tinggi 4,03 persen dan kegiatan pembangunan desa yaitu 5,78 persen. Selanjutnya, jenis kelamin sangat menentukan partisipasi dalam kegiatan desa. Perempuan cenderung memiliki kehadiran yang lebih rendah untuk semua kegiatan yaitu rata-rata hampir 20 persen dibandingkan pria (lihat Tabel 7).

terhadap kehadiran masyarakat pada kegiatan keagamaan dan kegiatan yang terkait dengan PNPM. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap kehadiran mengikuti kegiatan keagamaan yaitu seseorang yang berpendidikan tinggi akan cenderung tidak menghadiri kegiatan tersebut sebesar 1,37 persen. Pernikahan mendorong seseorang untuk menghadiri kegiatan keagamaan sebesar 5,2 persen.

Tabel 7. Pengaruh Karakteristik Individu terhadap Partisipasi pada Kegiatan Pembangunan Desa

Independen variabel	Dependen Variabel		
	Rapat Desa	Kerja Bakti	Keg. Pembangunan Desa
Pendidikan tinggi	0,0853*** (0,00637)	0,00565 (0,00693)	-0,0225*** (0,00654)
Menikah	0,0850*** (0,00510)	0,0403*** (0,00555)	0,0578*** (0,00523)
Wanita	-0,158*** (0,00438)	-0,228*** (0,00476)	-0,182*** (0,00449)
Usia	0,00432*** (0,000164)	0,00221*** (0,000178)	0,00306*** (0,000168)
Kemampuan membaca	0,0551*** (0,0168)	0,0550*** (0,0182)	0,00714 (0,0172)
Kemampuan menulis	0,0718*** (0,0162)	0,0163 (0,0176)	0,0488*** (0,0166)
Konstanta	-0,0632*** (0,0122)	0,200*** (0,0133)	0,107*** (0,0125)
Jumlah sampel	31.402	31.402	31.402
R kuadrat	0,086	0,079	0,070

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber: Hasil estimasi penulis menggunakan data survei IFLS5, 2016

Kemampuan membaca dan menulis juga teruji memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kehadiran pada seluruh kegiatan desa. Akan tetapi kemampuan membaca dan menulis bukanlah karakteristik yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kehadiran seseorang dalam kegiatan desa karena perbedaan antara yang mampu membaca dan menulis dengan yang tidak hanya sekitar 5 persen.

Penelitian ini juga menguji secara parsial hubungan karakteristik individu

Variabel umur terbukti menunjukkan pengaruh yang positif terhadap kehadiran seseorang pada kegiatan keagamaan yaitu semakin meningkatkan umur seseorang akan semakin cenderung mengikuti kegiatan keagamaan. Penambahan umur sebesar 1 tahun akan meningkatkan kehadiran sebesar 0.74 persen (lihat Tabel 9). Akan tetapi, interpretasi faktor umur harus dilakukan secara hati-hati karena jika usia individu semakin tinggi bisa jadi pengaruh ini menjadi negatif.

Tabel 8. Pengaruh Pendidikan dan Karakteristik Individu terhadap Kehadiran Masyarakat Pada Kegiatan Keagamaan dan PNPM

Independen Variabel	Dependen Variabel	
	Kegiatan Keagamaan	Kegiatan PNPM
Pendidikan tinggi	-0,0137* (0,00805)	-0,00683* (0,00385)
Menikah	0,0520*** (0,00644)	0,0274*** (0,00308)
Wanita	-0,00462 (0,00553)	-0,0357*** (0,00264)
Usia	0,00741*** (0,000207)	0,00106*** (9,91e-05)
Kemampuan membaca	0,0456** (0,0212)	0,0155 (0,0101)
Kemampuan menulis	0,0707*** (0,0204)	0,0367*** (0,00976)
Konstanta	0,112*** (0,0154)	-0,0289*** (0,00736)
Jumlah sampel	31.402	31.402
R kuadrat	0,051	0,017

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber: Hasil estimasi penulis menggunakan data survei IFLS5, 2016

Hasil estimasi di atas memberikan jawaban terhadap keterkaitan karakteristik individu terhadap partisipasi masyarakat. Pendidikan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi. Pada kegiatan rapat desa, masyarakat yang berpendidikan tinggi cenderung untuk hadir dibandingkan dengan masyarakat yang berpendidikan rendah. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian masyarakat yang berpendidikan tinggi terhadap pembangunan desa adalah tinggi. Akan tetapi, pada kegiatan-kegiatan pembangunan, masyarakat berpendidikan tinggi cenderung tidak hadir. Kondisi ini bisa didorong oleh mekanisme pelibatan yang mungkin *time-consuming* seperti yang ditemukan di dalam penelitian sebelumnya (Rega & Baldizzone, 2015).

Isu perbedaan gender dalam partisipasi juga menjadi permasalahan di Indonesia seperti terlihat dari hasil estimasi

pada Tabel 7 dan Tabel 8. Partisipasi wanita cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pria. Permasalahan yang sama juga telah diungkap oleh penelitian sebelumnya bahwa gender akan menjadi isu partisipasi mengingat gender sangat terkait dengan budaya dan agama (Okoro, 2016; Prasisca & Sutikno, 2015). Oleh sebab itu, mekanisme pelibatan masyarakat perlu dikaji kembali untuk menjawab tantang UU Desa yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

E. KESIMPULAN DAN LIMITASI PENELITIAN

1. Kesimpulan

Partisipasi masyarakat adalah amanah desentralisasi dan telah ditegaskan kembali di dalam UU Desa. Pelibatan masyarakat sangat terkait dengan karakteristik individu dan lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat

dalam kegiatan-kegiatan di desa masih relatif rendah yaitu berkisar pada angka 50 persen. Akan tetapi, pada kegiatan keagamaan, pelibatan masyarakat relatif tinggi.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi. Masyarakat dengan pendidikan yang tinggi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menghadiri kegiatan rapat desa sebesar 8,5 persen dibandingkan masyarakat dengan pendidikan yang lebih rendah. Akan tetapi, tingkat pendidikan menunjukkan hubungan yang negatif terhadap partisipasi pada kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Isu perbedaan gender dalam partisipasi juga masih menjadi permasalahan di Indonesia. Perempuan cenderung memiliki kehadiran yang lebih rendah untuk semua kegiatan yaitu rata-rata 20 persen dibandingkan pria.

Oleh sebab itu, penulis merekomendasikan untuk dilakukan pengkajian kembali mekanisme pelibatan masyarakat di Indonesia khususnya pada kegiatan-kegiatan di desa pasca berlakunya UU Desa.

2. Limitasi Penelitian

Penggunaan *Linear Probability Model (LPM)* menyebabkan hasil penelitian ini menghadapi kemungkinan *omitted-variabel bias*. Relatif sedikitnya variabel yang dikontrol menyebabkan koefisien pengaruh dapat menjadi *underestimated*. Bias juga dapat disebabkan tidak dikontrolnya karakteristik desa. Oleh sebab itu penulis menyarankan adanya penyempurnaan model penelitian dengan melibatkan lebih banyak variabel. Pemanfaatan panel data juga dapat digunakan untuk mengurangi bias penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 4918(November), 1 – 4 1 .
<https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>.
- Bardosh, K. (2015). Achieving “Total Sanitation” in Rural African Geographies: Poverty, Participation and Pit Latrines in Eastern Zambia. *Geoforum*, 66, 53 – 63 .
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.09.004>.
- Bibby, P. (2013). *Urban and Rural Area Definitions for Policy Purposes in England and Wales: Methodology (v1.0)*, Government Statistical Service, GSS. p.36.
- Blair, Harry (2000), 'Participation and Accountability at the Periphery: Democratic Local Governance in Six Countries', *World Development* 28 (1): 21–39.
- Chambers, R. (2013). *Rural Development: Putting the Last First*. Routledge, New York, p.256.
- Chromy, P. Jancak, P. Marada, M. (2011). Rural Areas - Living Space: Regional Differences in the Perceptions of Representative of Municipalities in Czechia Regarding Rural Area. *Geografie*, 116, 23-45.
- Dhokhikah, Y., dkk. (2015). Community participation in household solid waste reduction in Surabaya, Indonesia. *Resources, Conservation and Recycling*, 102, 153–162. <https://doi.org/>

10.1016/j.resconrec.2015.06.013.

Gottlieb, J. (2016). Why Might Information Exacerbate the Gender Gap in Civic Participation? Evidence from Mali. *World Development*, 86, 95–110. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.05.010>.

Khan, S. A. (2016). International Review of Public Administration Decentralization and Poverty Reduction : A Theoretical Framework for Exploring The Linkages Exploring The Linkages, 4659 (November). <https://doi.org/10.1080/12294659.2013.10805256>.

_____. (2013). Decentralization and poverty reduction: A theoretical framework for exploring the linkages. *International Review of Public Administration*, 18(2), 173–210. <https://doi.org/10.1080/12294659.2013.10805256>.

Malik, S., dkk. (2006). Fiscal decentralisation and economic growth in Pakistan. *Pakistan Development Review*, 45(4). <https://doi.org/10.1080/13547860.2011.539397>.

Manor, James. (1999). The political economy of democratic decentralization. Washington, DC: The World Bank.

Murshed, S. dkk,. (2009). Is Fiscal Decentralization Conflict Abating? Routine Violence and District Level Government in Java, Indonesia. *Oxford Development Studies*, 37(4), 397–421. <https://doi.org/10.1080/13600810903305224>.

Nurlaila, I., dkk. (2015). Public Participation: Energy Policy Aspect to Support Rural Electrification Program in West Java.

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 168, 321–327. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.237>.

Okoro, T. (2016). Diverse Talent: Enhancing Gender Participation in Project Management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 226 (October 2015), 170–175. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.176>.

Peluso, N. L. (2007). Violence, Decentralization, and Resource Access in Indonesia. *Peace Review*, 19(1), 23–32. <https://doi.org/10.1080/10402650601181840>.

Prasisca, Y., & Sutikno, F. R. (2015). Gender Equality and Social Capital as Rural Development Indicators in Indonesia (Case: Malang Regency, Indonesia). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211 (September), 370–374. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.048>.

Rega, C., & Baldizzone, G. (2015). Public participation in Strategic Environmental Assessment: A practitioners' perspective. *Environmental Impact Assessment Review*, 50, 105–115. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.09.007>.

Rock, A., dkk. (2016). Social networks, social participation, and health among youth living in extreme poverty in rural Malawi. *Social Science & Medicine*, 170, 55–62. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.10.005>.

Sinurat, H.P, & Sumanti, R. (2016). Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 6, 1131–1147.

Straka, J., & Tuzová, M. (2016). Factors Affecting Development of Rural Areas in the Czech Republic: A Literature Review. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 220(March), 496–505. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.525>

United States Department of Agriculture - USDA. (2006). Rural development. [2015-12-10]. Available at <http://goo.gl/iwFBDw>.

Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2015). Decentralisation and village governance in Indonesia: the return to the nagari and the 2014 Village Law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493–507. <https://doi.org/10.1080/07329113.2015.1109379>.

Yusuf, A. A., & Sumner, A. (2015). Growth, Poverty and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(3), 323–348. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1110685>.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sumber Data

<http://www.rand.org/labor/FLS/IFLS/ifls5.html>.

Lampiran 1. Kuesioner yang digunakan IFLS5

SECTION PM (COMMUNITY PARTICIPATION)

Now, I would like to ask you about some community or government activities and programs that may have taken place in this village during the past 12 months.

PROGRAM ATAU KEGIATAN MASYARAKAT (PM3TYPE)		PM15.	PM16.
		Do you know whether, in the last 12 months, the [...] activity has occurred in this village?	During the last 12 months did you participate in or use [...]?
A. Community Meeting (each level: 10 HH level, RT, RW, Village, Kecamatan, and including Village Advisory Board activities (LMD, LKMD))	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
B. Cooperatives (include all types and levels of cooperatives: 10 HH level, RT, RW, Village, Kecamatan.)	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
C. Voluntary Labor (for example cleaning up the village)	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
D. Program to Improve the Village/Neighborhood (KIP, MHT, con-block, street improvement, public facility)	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
N. Youth Groups Activity (Karang Taruna)	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
O. Religious Activities (Prayer groups, etc.)	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
P. Village library	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
Q. Village Savings and Loans	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
R. Health Fund (Dana Sehat)	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
R1. PNPM	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
R2. Political Party	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →
	3. No	8. DON'T KNOW	1. Yes →

PM20. CAPI CHECK BOOK COVER: SEX OF RESPONDENT ?	MALE ----- 1 → PM15 LINE E, F1, H, J1 FEMALE ----- 3 → PM15 LINE I, J, J1
--	--